

DAFTAR ISI

ISSN 2337-3512

01. Dari Redaksi	003
02. Editorial:	005
Aktualisasi Kepemimpinan Kristen dalam Kepemimpinan Nasional		

KAJIAN TEMA

03. <i>Victor Silaen</i>	011
Pembangunan Berbasis Budaya Nasional		
04. <i>Richard G Mayopu</i>	025
Boni Hargens: Kepemimpinan Transformasional; antara Simbol, Jokowi, dan Distorsi Politik		
05. <i>Floeanado Kilanta Ginting</i>	035
Aktualisasi Visi Teologi Politik Kristen O Notohamidjojo Bagi Kepemimpinan Bangsa. Suatu Kajian Reflektif terhadap Kekristenan di Indonesia dalam Mewujudkan Negara Pancasila		
06. <i>Yesaya Sandang</i>	057
Kepemimpinan dalam Bingkai Multikulturalisme		
07. <i>Irene Ludji</i>	067
Dari <i>Standing For</i> kepada <i>Acting For</i> : Kajian Etika Feminis atas Peran Gereja dan Perempuan Pemimpin di Indonesia		
08. <i>Gusti A. B. Menoh</i>	079
Urgensi Demokrasi Deliberatif bagi Kepemimpinan Nasional		
09. <i>Albert Josua P. Maliogha</i>	095
Distorsi Komunikasi dalam Kepemimpinan (Telaah terhadap Narasi Pembantaian Anak-anak oleh Herodes Agung dalam Matius 2:1-18)		

KAJIAN KHUSUS

10. <i>INgurah Suryawan</i>	111
Di Bawah Naungan Sang Kejora: "Nasionalisme" Papua Anti-Indonesia?		

RESENSI BUKU

11. <i>Mianto Nugroho Agung</i>	139
Cahaya Surgawi dari Suntae Kim		

Daftar Isi

12. Penulis Nomor Ini	143
13. Ketentuan Penulisan Artikel	145

Artistik dan Cover: Birmanti

Layout: Sukrisna

Tema Nomor Depan:

Memperkuat Ideologi Kebangsaan Melalui Perdamaian

Dari Redaksi

"The pessimist complains about the wind. The optimist expects it to change. The leader adjusts the sails." John.C.Maxwell

Pembaca Pax Humana (PH) yang budiman, perkenankan kami mengawali edisi awal tahun 2015 ini dengan mengucapkan selamat tahun baru dan menghadirkan beberapa perbaikan pada terbitan PH. Beberapa perbaikan dilakukan pada bagian ketentuan penulisan dan tata letak. Format pada edisi kali ini dihadirkan dalam rangka mempersiapkan diri untuk mengajukan akreditasi. Mulai tahun 2015 ini PH semakin ingin memantapkan bentuknya dan berkomitmen agar paling tidak pada tahun 2016 sudah dapat mengajukan diri untuk menjadi jurnal yang terakreditasi. Inilah yang menjadi doa dan harapan kami di tahun yang baru.

Memasuki tahun yang baru lumrah kiranya diiringi dengan doa dan harapan, dan ada kalanya resolusi awal tahun dibuat sebagai bentuk niatan untuk menggapai sesuatu yang lebih baik. Namun menggapai harapan membutuhkan usaha, dan mencapai sesuatu yang lebih baik mengandaikan adanya perubahan.

Setiap manusia siapapun dirinya diyakini memiliki kualitas yang mampu untuk menghasilkan perubahan sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Perubahan dalam skala besar membutuhkan ekstra usaha dan dorongan dalam diri yang juga semakin besar. Pada tingkat yang paling dasar adalah perubahan pada diri sendiri dan pada tingkatan yang lebih tinggi adalah perubahan massif pada skala masyarakat luas.

Kemampuan untuk mengolah, mensiasati hingga melakukan suatu perubahan diakui oleh banyak kalangan sebagai salah satu kualitas dari seorang pemimpin. Seorang pemimpin mesti menapaki setiap tingkatan yang dimulai dari dirinya sendiri, orang-orang terdekatnya hingga organisasi yang jauh lebih kompleks. Dengan demikian sebenarnya terdapat benih-benih kepemimpinan dalam diri setiap kita.

Dengan keyakinan semacam itu, pada edisi kali ini Pax Humana mengangkat topik kepemimpinan dengan tema 'Aktualisasi Kepemimpinan Kristen Dalam Perubahan Kepemimpinan Nasional'. Disadari bahwa pasca pergantian kepemimpinan nasional pada tahun 2014 lalu membawa setiap warga Negara Indonesia untuk memikirkan kembali peran strategisnya demi berkontribusi terhadap kemajuan bangsa. Oleh karena itu pada edisi kali ini redaksi menghimpun beberapa

tulisan yang sebagian diantaranya merupakan pengembangan dari materi yang sebelumnya telah disajikan pada Seminar dan Lokakarya dengan tema yang sama pada bulan November di Balairung Utama Yayasan Bina Darma, Salatiga.

Pilihan tema ini juga dianggap tepat sebagai pembuka awal tahun karena sebagaimana telah diutarakan sebelumnya, bahwa diawal tahun energi optimisme masih terpancar cukup besar. Namun energi tersebut perlu dikatalisasi lewat kualitas kepemimpinan -yang sejati sudah ada dalam diri setiap kita- agar antara harapan dan kenyataan dapat tergapai.

Akhir kata, kami ucapkan selamat membaca dan terprovokasi untuk dapat berperan serta sebagai agen-agen perubahan demi mewujudkan masa depan Indonesia yang lebih cerah apapun keadaan dan tantangan yang menghadang.

Sampul Edisi Ini



Setelah Pemilu Presiden beberapa waktu yang lalu, rakyat perlahan meninggalkan euphoria Pemilu dan kembali ke kehidupan sebenarnya sambil membawa harapan kehidupan yang lebih baik setelah adanya pergantian kepemimpinan di tingkat Nasional. Perubahan kepemimpinan di Indonesia akan membawa perubahan pada kondisi sosial politik di Indonesia. Masyarakat dari segala lapisan dan kalangan akan merasakan dampaknya, termasuk

kalangan Nasrani. Di tengah perubahan yang terjadi, umat Nasrani dipanggil untuk ikut berperan serta dalam perubahan, mejadi agen perubahan dengan membawa nilai Kristiani. Di tengah berbagai warna yang saling berbaur di negeri ini, mampukah umat Kristiani memberi warna baru dan turut serta membawa perubahan bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik?

Aktualisasi Kepemimpinan Kristen dalam Perubahan Kepemimpinan Nasional: Utopia Peyoratif Apa Konkret?

Perubahan kepemimpinan nasional Indonesia ditandai oleh berakhirnya hiruk pikuk Pemilihan Presiden Langsung 2014 yang dimenangkan oleh Joko Widodo. Sesuai dengan kampanyenya, Presiden Joko Widodo menjalankan kepemimpinan yang 'lebih mendengarkan rakyat' agar bisa didapat 'kemauan' dan 'kebutuhan' mereka demi menegaskan dan menjalankan 'Nawacita'. Untuk itu, Presiden Joko Widodo meminta seluruh menteri dan jajaran eksekutif lebih memperhatikan rakyat. Maka, diusunglah semangat 'revolusi mental' guna mengubah pejabat untuk lebih giat melayani rakyat. Presiden Joko Widodo lantas menegaskan ajakan untuk 'kerja, kerja, dan kerja' tidak saja kepada kabinetnya namun juga kepada seluruh elemen bangsa Indonesia. Tentu saja, dengan demikian, salah satu elemen bangsa itu adalah Gereja, di mana di dalamnya terdapat umat Kristen. Dan, salah satu unsur umat Kristen di dalam Gereja itu adalah pemimpinnya. Mereka itulah pemimpin Kristen dalam hal ini. Wakil Kristus di dalam organisasi-Nya.

Para pemimpin Kristen itu, dengan demikian, juga diminta Presiden Joko Widodo untuk 'kerja, kerja, dan kerja' itu. Sebab, sekali lagi, mereka adalah salah satu elemen bangsa. Dengan demikian, para pemimpin Kristen juga harus lebih mendengarkan 'rakyat' mereka yang dalam hal ini adalah jemaat (di gereja), pegawai (di institusi formal), anak-isteri/suami (di keluarga), dan seterusnya.

Masalahnya, atas nama rakyat, sering kali para pemimpin itu membuat keputusan kebijakan yang kurang bijaksana. Misalnya, belum setahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo kita sudah menyaksikan aneka drama yang membingungkan rakyat: menghebatnya krisis air bersih, kriminalitas yang makin beragam dan massif dan merata; perseteruan KPK dan Polri; Dualisme Kepengurusan Partai; hukum yang tajam ke rakyat Asyani tetapi tumpul ke koruptor kakap; kisruh harga: naik turunnya harga BBM, kenaikan-kenaikan harga-harga sembako, tarif angkutan umum, dan sebagian besar harga komoditas vital rakyat; kisruh raskin; melemahnya rupiah; kisruh dunia pendidikan: penyelenggaraan UN, buku ajar bermasalah, rendahnya kesejahteraan guru, dan lain-lain. Dan, rakyat, sebagai salah satu elemen bangsa terpentinglah yang menanggung biaya dan akibat semua itu.

Di Gereja dan institusi Kristen, kita juga menyaksikan (mungkin juga mengalami) betapa program-programnya masih elitis, spontan, periferial, dan parsial. Padahal, seharusnya wilayah operasi pemimpin Kristen tidak terbatas pada Gereja dan institusi Kristen. Kepemimpinan Kristen yang melekat ke diri pemimpin Kristen seharusnya beroperasi secara luas hingga ke wilayah bangsa dan negara. Para elit Gereja seharusnya juga melayani bangsa dan negara ini. Program yang elitis adalah program yang didesain dan ditetapkan hanya dari balik meja kerja pemimpin tanpa mengakomodasi keinginan dan bahkan kebutuhan akar rumput. Program yang spontan sifatnya, adalah program yang dirancang hanya untuk merespon situasi yang berkembang saat itu. Program yang periferial (permukaan) adalah program yang permukaan belaka untuk pantas-pantasnya saja, tak ada kedalamannya. Program yang parsial adalah program yang dikerjakan sendiri-sendiri terpisah dari keseluruhan Gereja di muka bumi dan bahkan tercerabut dari akar dan fondasinya, yakni Alkitab.

Di Institusi Kristen demikian juga, masih banyak praktik 'semua gue' pemimpinya. Di sini, bahkan, pemimpin seringkali adalah hukum itu sendiri. Memang, AD/ART dan aturan yang lebih rendah dari AD/ART sudah ada, tetapi terbungkam jika menyangkut 'rakyat'-nya. Maka, baik program maupun kebijakan ditetapkan atas dasar pertimbangan yang dangkal dan subyektif: *like and dislike*, interes (bahkan selera) pribadi, reaktif (bahkan ofensif), dan lain-lain. Ada juga institusi Kristen yang mengabaikan hak-hak 'rakyatnya' dalam hal kesejahteraan, pengembangan diri, rekreasi, promosi, pengembangan program, akuntabilitas-responsibilitas, dan akses ke pergaulan sesama institusi Kristen. Beberapa institusi Kristen bahkan juga terperosok ke problem finansial, moral, dan sosial yang memalukan. Beberapa pemimpinya jatuh ke problem serius. Di tempat dan problem semacam itulah sesungguhnya aktualisasi kepemimpinan Kristen penad dikerjakan secara lebih serius sehingga berubah menjadi baik dan memberikan kontribusi ideal yang sangkil dan mangkus bagi pemuliaan manusia dan hormat bagi Tuhan Yesus Kristus. Dari mana dan bagaimana memulai proses aktualisasi itu?

Sebagai orang Kristen, pengikut Yesus dari Nazaret, kita harus memulai dari apa yang dikehendaki Allah bagi para pemimpin Kristen. Sekali lagi, pemimpin Kristen bukan lagi sebatas elite Gereja atau Institusi Kristen, tetapi meluas ke setiap orang Kristen yang harus memimpin dirinya sendiri juga. Di sanalah kepemimpinan Kristen perlu dioperasikan

dengan baik dan benar. Di mana kehendak Allah itu kita ketahui? Di Alkitab. Benar, untuk menjawab pertanyaan 'bagaimana', hanya dengan membaca kritis dan merenung-renungkan Alkitab maka kita bisa mengetahui kehendak Allah dan karena itu kita bisa memulai proses aktualisasi kepemimpinan Kristen kita. Setelah menguasai dasar bagaimana dan dari mana memulai proses aktualisasi kepemimpinan Kristen, maka seluruh aspek kehidupan bisa dilihat sedemikian rupa sebagai kehendak Allah atau bukan (misalnya: kehendak diri, kelompok, dan pihak lain). Jika kepemimpinan Kristen kita justru melahirkan ketidakadilan, kesewenang-wenangan, kenistaan, alienasi (menyitir Hegel Muda), dan penindasan HAM orang lain, maka kepemimpinan kita belum aktual dan karena itu perlu diaktualisasi. Sebab, kepemimpinan yang aktual (=sejaman dengan diri kita saat hidup) sesungguhnya adalah kepemimpinan kini dan di sini. Kepemimpinan kini adalah kepemimpinan yang mengakomodasi isu-isu, dasar-dasar, tren dan rupa-rupa kearifan yang sedang menyekitari praksis. Sementara itu, kepemimpinan di sini adalah kepemimpinan yang berakar dan terarah pada realitas setempat. Artinya, kepemimpinan harus melayani terlebih dahulu 'rakyat' setempat baru melebar ke 'rakyat' yang lebih luas. Tuhan Yesus sudah memberikan pengajaran bahwa barang siapa mengatakan mengasihi Allah yang tidak kelihatan tetapi tidak mengasihi saudaranya yang kelihatan, sesungguhnya yang bersangkutan sedang berbohong.

Problem terbesar kepemimpinan Kristen adalah kebohongan itu! Bisa diduga itu karena para pemimpin Kristen menafikan Alkitab. Kalau toh kepemimpinan Kristen diklaim telah dipraktikkan, pastilah bisa diduga itu juga kebohongan dalam diri pemimpin itu. Memang, setiap keputusan telah didoakan dalam nama Bapa, Yesus, dan Roh Kudus, namun seringkali itu hanya formalitas mekanistik. Maka, menurut Karl Manheim, kepemimpinan Kristen yang demikian menjadi utopia yang peyoratif ketimbang yang seharusnya dikejar, yaitu utopia yang konkret menurut Ernest Bloch.

Kepemimpinan Kristen utopis yang peyoratif adalah kepemimpinan Kristen negatif alih-alih menghadirkan secuil sorga –menafsir George Baum- di bumi, sebaliknya justru menjelma menjadi neraka nan tak terbayangkan kengeriannya. Para utopian peyoratif seringkali adalah para positifis yang –misalnya- meyakini biologisme hukum dan politik hukum sedemikian rupa demi keuntungan diri sendiri atau kelompoknya dengan menindas orang lain yang secara struktural tersubordinasi. Dalam biologisme hukum, manusia yang tertinggi di suatu struktur kebal

terhadap hukum karena menganggap diri dan atau kelompoknya adalah hukum itu sendiri. Sementara, dalam politik hukum –sebagaimana diajarkan Macchiavelly dan Hobbes- hukum menyangkut kekuasaan dengan pihak yang paling berkuasa menegaskan dirinya sebagai hukum. Hasilnya: tidak adanya kepastian hukum! Paling tidak, adanya pagu ganda (*double standard*). Akumulasi dari keduanya adalah pelanggaran HAM. Dan, kita tahu bersama pelanggaran Ham adalah ketidakadilan tertinggi bahkan korupsi paling sempurna!

Kepemimpinan Kristen utopis konkret adalah kepemimpinan Kristen positif yang mengerjakan sesuatu yang bernilai 'langit baru bumi baru' bagi segenap manusia. Dimulai dengan –belajar dari karya agung Yesus Kristus- mempromosikan dan mendukung berlakunya kepastian hukum. Hukum harus bersifat mengatur (*regulatif*) dan mengendalikan/mencegah (*preventif*) bagi penguasa yang cenderung tidak adil dan korup. Kepastian hukum memberikan keberanian dan membangun produktivitas serta kreativitas rakyat di satu sisi dan menjamin agar penguasa tidak sewenang-wenang di sisi yang lain. Memang, seharusnya hasil positif dari kepemimpinan Kristen adalah tertuju kepada segenap manusia. Awalnya tentu saja dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Sebab, menyitir Paul Knitter, kita umat manusia ini tak bisa mengindar dari kenyataan kalau tinggal bersama di satu bumi ini. Setiap aktifitas yang kontraproduktif adalah kesalahan terbesar bagi pelakunya. Aktifitas kontraproduktif itu bisa termanifestasi dalam praktik kepemimpinan Kristen yang bias dan subyektif sehingga nyata-nyata merugikan pihak lain (khususnya rakyat dan bawahan) dan menguntungkan diri sendiri. Mengingat '*power tend to corrupt*' yang dilontarkan Lord Acton cenderung semakin terbukti secara nyata dan 'telanjang', maka tidak ada rugi dan salahnya jika kita umat Kristen yang mengemban amanat untuk menghadirkan secuil surga dari 'rakyat' (baik jemaat maupun bawahan) ini menjalankan praktik kepemimpinan Kristen sebagai praksis (tindakan yang benar) dari satu dasar ortodoksi (ajaran yang benar) yakni Alkitab.

Secara teknis, kita bisa menempuh dan belajar praksis komunikasi Jokowi yang dipetakan Boni Hargens. Atau, mendekatinya secara kultural ala Victor Silaen. Namun, untuk konteks Indonesia, kontribusi pemikiran John A Titaley amat relevan dan kontekstual. Bacalah –misalnya- pemikiran John A Titaley dalam *Religiousitas di Alinea Ketiga* (Satya Wacana University Pers, 2013), maka kita akan mahfum dengan gagasan bahwa pluralisme, nasionalisme, dan agama-agama yang sudah

ditransformasi merupakan *asset* dan modal dasar penting bagi Indonesia yang ideal dan –tentu saja- bagi proses aktualisasi kepemimpinan Kristen Indonesia.

Akhirnya, dalam arak-arakan besar proses aktualisasi kepemimpinan nasional yang tidak memberi toleransi bagi bias sedikitpun ini, kepemimpinan Kristen mau tidak mau juga harus disesuaikan dengannya agar visi hadirnya langit baru dan bumi baru dalam berbagai ragam dan bentuk yang memuliakan manusia dan hormat bagi Tuhan Yesus Kristus itu realistis dikerjakan. Kalau kita saat ini menjadi bagian yang utopis peyoratif, seharusnya memanfaatkan waktu yang ada untuk berubah menjadi utopis konkret sehingga segerakan dengan arak-arakan besar proses aktualisasi kepemimpinan nasional maupun kepemimpinan Kristen. Dengan demikian, kita memberikan kontribusi positif dan konkret dalam melayani rakyat kita. Itulah kasih kepada Allah yang sesungguhnya, sebab, kita telah membuktikannya dengan cara yang nyata yaitu mengasihi saudara kita yang kelihatan: rakyat dan bawahan. Bukan sekadar rakyat, tetapi prioritas yang berpihak kepada mereka yang miskin dan tertindas!

Salatiga, Paskah 2015 (5 April 2015)
Mianto Nugroho Agung

Pembangunan Berbasis Identitas Budaya Nasional¹

Oleh Victor Silaen

Abstract

Develops the nation is mean develop it human being. Develops human being is mean improves its culture. Because that basic, so the progress of a nation basically is reflection of super power of it culture. So, how far the progress of economic, political, and all of progress that received a nation is depend on cultural value that preservation by its nation. For it, in the future, Indonesia must be create a cultural developing as most vital agenda and urgent agenda. It is mean all of policy of the government must be oriented to make good education and enlighten society over the education sector or other sector. Education is not just formal kind (school/higher education) but also non formal education (out of school or higher education). Because, through the education logic and potential of human being can be improved. And, if both of it improving can cause human being be creative and innovative. This is the big and important capital in development. In other side, Indonesian nationalism also must be stabilizing, and must be based on democracy that facilitated the same participation space to every person in society and honour the human right and law.

Keywords: *Culture, the values of culture, religion, national culture, envelopment.*

Kebudayaan sebagai Pedoman

Manusia adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Di mana pun dan siapa pun, manusia cenderung untuk selalu mencari kawan. Itulah hakikat manusia sebagai makhluk sosial (*homo socius*). Dalam proses yang terus-menerus, upaya pencarian kawan itu mengakibatkan terbentuknya kelompok-kelompok sosial keluarga, kekerabatan, dan lainnya. Pada tahapan berikutnya, kelompok-kelompok sosial yang saling berinteraksi itu pun berkembang lagi menjadi lebih besar dan semakin besar hingga membentuk unit-unit sosial seperti puak (sub-suku), suku, dan akhirnya masyarakat (kalau mau diteruskan, secara politik, akan terbentuk pula bangsa).

Setiap masyarakat memiliki kebudayaan² yang berfungsi sebagai acuan dan pedoman menyeluruh (*lifes blue print*) di dalam kehidupannya.³

Kebudayaan itu tercipta seiring proses dan waktu, ketika manusia berupaya memenuhi pelbagai jenis kebutuhan hidupnya -- baik yang bersifat biologis, psikologis, sosiologis, religius, ekonomis, seni dan estetika, dan kombinasi antara semua jenis kebutuhan tersebut. Pada sisi lain, kebudayaan juga tercipta seiring proses dan waktu, ketika manusia berupaya menghadapi dan mengatasi pelbagai macam masalah hidupnya -- baik yang timbul dalam hubungannya dengan sesama (sosial), dengan lingkungan (natural/fisik), maupun dengan pelbagai hal yang sifatnya misteri dan gaib (supranatural/metafisik). Di dalam semua upayanya itu, manusia jelas menggunakan akal-budinya. Itulah sebabnya, kebudayaan hanya ada dan dimiliki oleh makhluk yang berakal budi.⁴

Mencermati asal-usul terjadinya itu, maka jelaslah kebudayaan merupakan "sesuatu" yang besar di dalam seluruh kehidupan manusia di dunia, yang mencakup unsur-unsur: 1) bahasa dan komunikasi; 2) ilmu pengetahuan; 3) teknologi; 4) ekonomi (mata pencarian); 5) organisasi sosial (pengelompokan sosial); 6) agama (religi); 7) kesenian.⁵ Dalam wujudnya yang abstrak, kebudayaan berada di dalam pikiran manusia (di aras kognitif) yang terdiri atas model-model pengetahuan, konsep-konsep, ide-ide, dan teori-teori. Namun secara konkret, ia juga mengejawantah dalam bentuk tindakan-tindakan yang berpola. Dengan demikian, maka kebudayaan dapat diartikan sebagai semua pola pikir dan pola tindakan yang menjadi cetak biru (*blue print*) dan digunakan sebagai acuan dan pedoman di dalam seluruh kehidupan manusia -- untuk memenuhi pelbagai jenis kebutuhan hidupnya maupun untuk menghadapi dan mengatasi pelbagai macam masalah hidupnya.

Secara lebih rinci dapat dijelaskan begini. Upaya mengatasi masalah kesenjangan dalam hubungan antarmanusia akhirnya menghasilkan sesuatu yang disebut bahasa dan komunikasi. Sedangkan upaya membagi peran dan menetapkan fungsi dalam kehidupan setiap anggota masyarakat menyebabkan terbentuknya organisasi sosial (pengelompokan sosial). Akan halnya ekonomi (mata pencarian), merupakan unsur kebudayaan yang tercipta dari pergelutan hidup manusia dalam upayanya memanfaatkan alam dan isinya demi pemenuhan kebutuhan hidup primernya (makan-minum). Sedangkan teknologi dimanfaatkan untuk mengubah kondisi alam yang liar dan ganas menjadi indah dan subur serta bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup manusia.

Sementara agama merupakan kristalisasi dan konkretisasi dari adanya hasrat di sanubari untuk mengatasi masalah dan memuaskan

kebutuhan akan kepastian hidup di masa depan, kesadaran akan keterbatasan dan ketidakberdayaan diri serta langkanya sumber-sumber kehidupan di dunia, konsep tentang yang benar dan yang salah, yang sakral dan yang profan, dan kepercayaan terhadap “pribadi” yang mahakuasa dan misteri di balik penciptaan alam semesta.⁶ Demikian seterusnya dengan unsur-unsur kebudayaan yang lainnya. Selalu ada masalah dan kebutuhan dahulu, sehingga karena itulah manusia memikirkan cara serta upaya pemenuhan dan penyelesaiannya, yang kemudian melahirkan unsur-unsur kebudayaan tersebut.

Itulah proses lahirnya kebudayaan jika ditelusuri ke asal-usulnya. Wujudnya abstrak, karena berada pada tingkat kognitif dan kesadaran manusia. Namun ia juga konkret, karena dapat diamati melalui tindakan-tindakan berpola masyarakat dalam kehidupan sehari-hari (termasuk di dalamnya semua material, gerak-gerik, suara-suara, dan lainnya, hasil olah rasio dan afeksi manusia). Maka, jika ingin mengenali kebudayaan suatu masyarakat atau kelompok sosial tertentu, lihatlah apa dan bagaimana rutinitas kehidupan mereka setiap harinya. Kebudayaan Orang Minahasatentu berbeda dengan kebudayaan Orang Batak. Lihat saja cara mereka berinteraksi satu sama lain (unsur bahasa dan komunikasi). Orang Batak yang (*secara partuturan*) selalu memperhitungkan kedudukan orang lain yang menjadi lawan bicaranya tentu berbeda dengan Orang Minahasa yang kurang memperhatikan hal itu.

Kebudayaan merupakan sesuatu yang dipelajari dalam kehidupan manusia (enkulturasi). Ia juga diwariskan secara sosial (bukan genetik) dari satu generasi ke generasi berikutnya. Itulah sebabnya ia berubah seiring perkembangan yang terjadi di lingkungannya. Namun, perubahan itu sendiri relatif sulit, tak banyak dan kerap lambat. Sebab, jika ia mudah dan cepat berubah, maka berarti pula kehidupan masyarakat akan kacau dan tak beraturan -- karena pedoman kehidupannya selalu berubah. Jika demikian halnya, bagaimana mungkin bisa mengidentifikasi kebudayaan Orang Batak sebagai begini atau begitu? Bagaimana mungkin bisa membuat daftar nilai-nilai budaya Orang Jawa sebagai ini dan itu?

Namun bukan begitu kenyataannya, sebab kebudayaan juga bersifat tradisional. Ia bersifat ajeg (bukan berarti mandek), dan karena itulah kita dapat mencirikan Amerika Serikat sebagai bangsa yang individualistik, demokratis, pragmatis, dan lain sebagainya. Atau Indonesia sebagai bangsa yang (konon) ramah, sopan, sabar, suka menolong (*gotong royong*), dan sebagainya. Karena sifatnya yang tradisional, kita dapat menarik benang merah antara kebudayaan masa kini dan masa lampau.

Dengan kata lain, apa dan bagaimananya suatu kebudayaan dewasa ini, meski sudah banyak mengalami perubahan, tetap dapat ditelusuri akarnya hingga ke masa lampau kebudayaan itu.

Jika banyak dari ciri-ciri dan tradisi-tradisi yang dimiliki oleh suatu kebudayaan masa lampau mampu bertahan hingga kini, yang karenanya dapat kita lihat dan temukan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat pemilik kebudayaan itu, tak lain disebabkan oleh sifat kebudayaan yang tradisional dan ajeg itu. Di dalam kehidupan sehari-hari, orangtua akan mewariskan kebudayaannya yang dipedomannya itu kepada anak-anaknya dengan cara mendidik dan mengajarnya itu, menanamkan nilai-nilai, mentransfer pengetahuan-pengetahuan, membekalnya dengan petunjuk-petunjuk, dan sebagainya. Sebaliknya dari pihak anak, mereka sendiri akan belajar (termasuk dalam hal ini adalah meniru) dari para orangtua (dan orang-orang lain yang dituakan) tentang segala hal yang bermanfaat bagi kehidupan, baik yang teoritis maupun praktis, agar kelak mereka mampu berperan dan berfungsi sebagai anggota kelompok atau masyarakatnya sebagaimana yang diharapkan.

Kebudayaan adalah milik masyarakat, bukan milik individu. Karena itulah kita dapat mengamati adanya kesamaan-kesamaan antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lain di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Itulah sebabnya kebudayaan sulit untuk diubah atas prakarsa orang-perorang. Ia selalu harus melibatkan banyak orang (komunitas). Atas dasar itu tak heran jika kebudayaan relatif sulit berubah.⁷ Apalagi ia juga dianggap baik oleh masyarakat pemiliknya, sehingga selalu diupayakan untuk dipertahankan, dan karena itulah cenderung menjadi tradisi-tradisi (yang sejak dulu sampai sekarang seperti itu).

Jika kebudayaan memang sulit berubah, mungkinkah ia dapat dilestarikan? Kalau mungkin, lalu apa manfaatnya? Ada beberapa jawaban untuk ini. Pertama, mungkin saja. Dengan catatan: kita berniat melakukannya. Tapi itu pun hanya terhadap produk-produk (atau benda-benda) kebudayaan (*material culture*), bukan kebudayaan itu *an sich*. Dalam kebudayaan Orang Batak, misalnya, kita dapat melestarikan agar *ulos* tetap sama, antara dulu dan sekarang (tapi, betulkah tetap sama?). Begitupun instrumen-instrumen musik Batak, kita bisa saja melestarikannya agar tidak berubah (tapi, bukankah kemajuan elektronik juga telah menyentuh sebagian instrumen tersebut?). Kedua, kalau kita mau mengisolasi diri dari segala pengaruh kebudayaan luar atau asing. Pertanyaannya, bisakah kita membuat masyarakat Batak menjadi eksklusif? Bukankah sarana-prasarana transportasi dan telekomunikasi

yang canggih serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pun telah menyentuh warga Batak sampai ke *huta-huta* sana? Kalaulah kita, karena keinginan melestarikan kebudayaan lantas mampu mengisolasi diri sehingga tak 'tercemar' oleh pengaruh-pengaruh asing, apakah upaya itu sendiri bermanfaat? Jelas tidak. Karena, ketertutupan menghalangi perubahan. Dan jika perubahan tak ada, maka kemajuan pun tak tercapai. Itukah yang kita kehendaki? Apakah demi keinginan melestarikan kebudayaan, kita rela hidup di dalam keterbelakangan?

Arus kemajuan dewasa ini telah sedemikian pesatnya. Itu berarti, bisa jadi sebagian orang akan mengalami "gegar budaya" (*culture shocked*) atau selalu teralienasi dengan dunia dan sistem-sistem kehidupan yang berlaku di dalamnya jika tak mampu beradaptasi dengan gerak perubahan dan perkembangan itu. Atas dasar itu kita pun harus berupaya untuk selalu menyesuaikan diri. Kita harus membuang sikap yang terlalu mengagung-agungkan kebudayaan atau adat-istiadat nenek-moyang yang membuat kita kerap terpaku mati untuk memberlakukannya serupa dengan apa yang berlakudulu. Saya sama sekali tak bermaksud mengatakan bahwa kita tak perlu lagi menghormati warisan nenek-moyang yang berharga itu. Bukan itu maksudnya. Saya hanya ingin menekankan bahwa kita harus mampu beradaptasi dengan situasi dan kondisi kekinian yang kian menuntut setiap orang untuk hidup secara independen (mandiri, tak tergantung pada keluarga, kelompok atau kerabatnya), kompetitif (selalu siap bersaing dengan siapa pun), efisien, efektif, serta tak lagi menghambur-hamburkan energi dan materi untuk hal-hal yang manfaatnya tak sebanding.

Maka, inilah saatnya bagi kita untuk secara bersama-sama mengevaluasi hal berikut: adakah nilai-nilai budaya komunitas kita yang justru bertentangan dengan atau anti terhadap ciri-ciri atau semua persyaratan yang dituntut oleh modernisasi? Untuk membantu menjawab pertanyaan tersebut, saya ingin memberikan contoh konkret yang hingga kini masih ada dan dapat kita saksikan di dalam komunitas Batak, terutama di *huta-huta* sana. Orang Batak mengenal apa yang namanya *saurmatua*, yakni sebutan bagi orang yang meninggal, yang di saat meninggalnya itu semua anaknya sudah menikah dan sudah memberinya cucu (terutama dari anak laki-lakinya). Menurut adat-istiadat, orang yang *monding* dengan status *saurmatua* ini wajib diberangkatkan ke tempat peristirahatannya yang terakhir dengan *dilotung-lotungi*, yakni memukul *ogung* (perangkat musik Batak untuk mengiringi *tortor*).

Menurut adat-istiadat Batak pula, kita diwajibkan menghormati

orangtua dan *hula-hula*. “*Somba marnatua-tua dohot marhula-hula*”, itulah kalimat bertuah yang harus dicamkan. Atas dasar inilah maka upacara penguburan orang yang *monding* dengan status *saurmatua* itu kerap berlangsung lama (sampai tiga empat hari, bahkan seminggu) dan relatif mewah (karena ada musik dan makanan-minuman). Belum lagi kalau karena keinginan *manomba* si orangtua yang *monding* itu kemudian pihak anak, *boru*, dan *bere*-nya membangun tugu di atas makamnya. Kalau dihitung-hitung, berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk semua itu? Siapa sajakah yang wajib menanggungnya, dan haruskah itu dibagi sama rata atau atas dasar kerelaan masing-masing saja? Bukankah ini rawan konflik, jika ternyata pihak-pihak yang diharuskan menanggung biaya tersebut berbeda-beda kondisi finansialnya?

Kita setuju orangtua harus dihormati. Kita sepakat orang yang meninggal harus dikuburkan dengan sebaik-baiknya. Tapi, haruskah dana yang besar dihabiskan untuk itu, padahal masih ada anak-cucuyang memerlukannya untuk sekolah, modal usaha, menikah, dan lain sebagainya? Lagi pula berapa banyak waktu, tenaga, dan pikiran yang tersita untuk itu? Bagaimana jika peristiwa kematian itu terjadi di kota besar seperti Jakarta atau Surabaya? Haruskah si orangtua yang *monding* itu dibawa ke *huta* sana untuk penguburannya? Bukankah untuk itu memerlukan biaya ekstra yang tak sedikit? Apalagi kalau setelah naik pesawat terbang, masih juga harus menyeberang ke pulau, lalu disambung dengan berjalan kaki mendaki bukit untuk beberapa waktu lamanya. Alangkah tidak efisiennya.

Katakanlah, karena satu dan lain hal, akhirnya keluarga besar si orangtua yang *monding* itu sepakat untuk menguburkan mayatnya di kota tempat dia meninggal. Misalkan di Jakarta. Bayangkan kalau acara pesta dan upacara penguburannya sampai berhari-hari. Bagaimana dengan tetangga di sekeliling yang terganggu ketenteramannya? Bagaimana dengan situasi lalu-lintas dan jauhnya jarak antartempat yang membuat orang segan pergi dan pulang terus-menerus ke dan dari rumah duka itu?

Hal-hal seperti ini penting dan perlu dipikirkan secara serius. Intinya saya ingin mengatakan, seiring proses perubahan dan perkembangan yang tak pernah berhenti, selayaknyalah kita merevisi dan memodifikasi adat-istiadat itu. Bukan untuk dibuang, melainkan hanya disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang kekinian.